

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM WILAYAH DAN GEOGRAFIS

Provinsi Banten dibentuk dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, sebelumnya merupakan daerah Karesidenan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah **8.651,2 km²**, secara administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten yaitu: *Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang*; dan 4 kota yaitu: *Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan*, serta terbagi atas 154 kecamatan dan 1.504 desa/kelurahan.

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105° 1' 11" – 106° 7' 12" Bujur Timur dan 5° 7' 12" – 7° 1' 1" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda (Provinsi Lampung).

Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin *Monson (Monsoon Trade)* dan Gelombang *La Nina* atau *El Nino*. Saat musim penghujan (November - Maret) cuaca didominasi oleh angin barat (dari Sumatera, Samudera Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Temperatur di daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22°C - 32°C, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400 - 1.350.m d.p.l mencapai antara 18°C - 29°C. Terdapat sekitar 55 pulau kecil yang sangat potensial untuk dikelola, yang tersebar di wilayah Banten maupun di perbatasan wilayah Banten.

Bentang wilayah Provinsi Banten berada pada ketinggian antara 0 – 1000 meter diatas permukaan laut (m d.p.l). Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 50.m d.p.l terbentang disepanjang pesisir utara (pesisir Laut Jawa), yakni meliputi sebagian wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Tangerang. Demikian halnya dengan sebagian wilayah pesisir selatan Kabupaten Pandeglang hingga Kabupaten Lebak, dengan kemiringan lahan antara 0 – 15% (datar). Adapun wilayah perbukitan yang bergelombang dengan kemiringan antara 15 – 40% umumnya terdapat di bagian tengah Provinsi Banten, yakni mencakup wilayah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta bagian Utara Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya untuk perbukitan terjal (curam) dengan kemiringan >40% terdapat di Kabupaten Lebak dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang sebelah selatan.

Sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi dua tipe tanah yaitu: (a) kelompok tipe tanah sisa atau residu dan; (b) kelompok tipe tanah hasil angkutan. Secara umum distribusi dari masing-masing tipe tanah ini di wilayah Provinsi Banten, terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain: 1. Aluvial pantai dan sungai; 2. Latosol; 3. Podsolik merah kuning; 4. Regosol; 5. Andosol; 6. *Brown Forest*; 7. Glei.

Struktur geologi daerah Banten terdiri dari formasi batuan dengan tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200 – 800 meter dan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter. Formasi Bojongmanik merupakan satuan tertua berusia *Miosen akhir*, batuanannya terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasir, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, umurnya diduga *Pliosen awal*. Berikutnya adalah Formasi Cipacar yang terdiri dari tuf batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, umurnya diperkirakan *Pliosen akhir*. Di atas formasi ini adalah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasir, lempung pasir, batu gamping kokina dan tuf.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan *Alluvium* yang berumur mulai *Miosen awal* hingga *Resen*, satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur *Eosen*. Formasi Bayah terdiri dari tiga anggota yaitu Anggota Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicarurueup, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur *Plistosen tua* hingga *Holosen*. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesit sampai basal. Tuf Cikasungka berumur *Plistosen*, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuartar. Pada wilayah Leuwidamar terdapat pula singkapan batuan metamorf yang diduga berumur Oligo Miosen terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Diorit Kuarsa berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuartar. Batuan endapan termuda adalah aluvium dan endapan pantai yang berupa Kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Potensi sumber daya air di wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan pembagian Wilayah Sungai (WS), Provinsi Banten terbagi ke dalam 3 (tiga) Wilayah Sungai dengan total panjang aliran sungai didalamnya mencapai 546,39 km. Ketiga Wilayah Sungai tersebut yaitu:

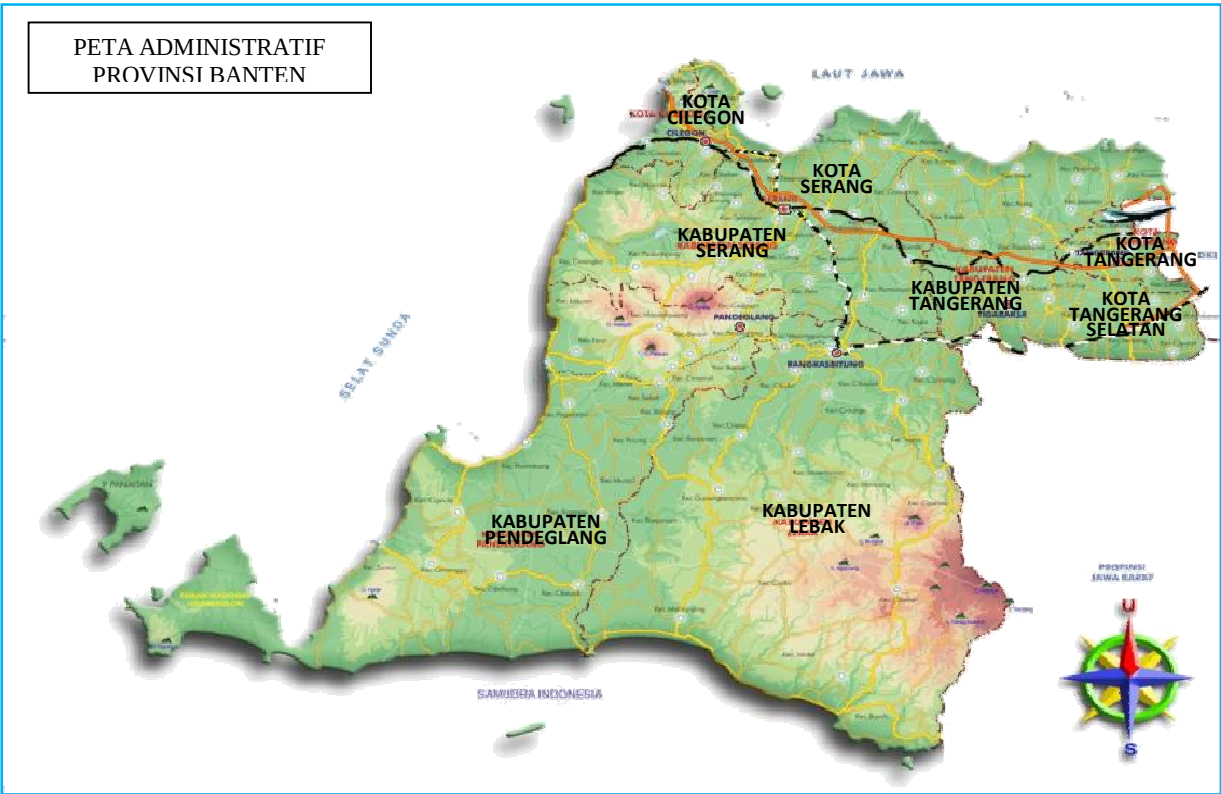
- Wilayah Sungai Cijung-Ciliman, yang didalamnya meliputi aliran Sungai Cidurian, Sungai Cijung, Sungai Cibungur, dan Sungai Ciliman. Wilayah Sungai Cijung-Ciliman ini meliputi wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak;
- Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung, yang didalamnya meliputi aliran Sungai Cimanceuri dan Sungai Cisadane. Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung ini meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- Wilayah Sungai Cisadea-Cikuningan, yang didalamnya meliputi aliran Sungai Cibuangeun, Sungai Cihara, Sungai Cimadur, Sungai Cisihi, Sungai Cimancak, dan Sungai Cibareno. Wilayah Sungai Cisadea-Cikuningan ini meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Tata air permukaan untuk kebanyakan wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air, khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 (lima) satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi dan bersifat lintas kabupaten maupun kota, yaitu CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas provinsi, meliputi CABT Serang-Tangerang dan CABT Jakarta.

Penduduk Banten berdasarkan data hasil Sensus Penduduk menunjukkan jumlah yang terus bertambah. Pada tahun 1961 tercatat sebanyak 2.438.574 jiwa dan tahun 1971 meningkat menjadi 3.045.154 jiwa, kemudian meningkat kembali menjadi 4.015.837 jiwa pada tahun 1980 dan 5.967.907 jiwa pada tahun 1990. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) telah bertambah menjadi sebanyak 8.096.809 jiwa, pada tahun 2007 jumlah penduduk Banten meningkat kembali menjadi 9.423.367 jiwa, dan pada tahun 2008 jumlahnya menjadi 9.602.445 jiwa.

Laju Pertumbuhan penduduk Banten kurun waktu 2000-2008 rata-rata tumbuh sebesar 2,15%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan pertumbuhan antara tahun 1990-2000 yang rata-rata tumbuh sebesar 3,21%. Dari perkembangan tersebut terlihat jumlah penduduk di wilayah Provinsi Banten terus mengalami penambahan baik yang diakibatkan adanya kelahiran maupun akibat migrasi, khususnya pada wilayah-wilayah perkotaan seperti Tangerang dan Cilegon.

Secara historis, Banten memiliki sejarah yang cukup panjang, dimana sekitar abad 16-17 Banten mengalami masa kejayaan dibawah pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu Banten menjadi salah satu kota perdagangan terbesar di Kawasan Asia Tenggara dan dikenal sebagai pusat perdagangan Nusantara. Dimasa kejayaan tersebut, Banten menjadi tempat persinggahan para pedagang dan saudagar dari berbagai belahan dunia sekaligus menjadi pusat perkembangan budaya.



2.2. KONDISI DAN TANTANGAN ASPEK PEMERINTAHAN

Secara Legal Formal, Pemerintahan Provinsi Banten dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2000. Pertimbangan pendirian Provinsi Banten menurut undang-undang tersebut adalah :

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan di masa yang akan datang;
2. Adanya kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya;
3. Karena meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Barat;
4. Untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pada awal pembentukannya, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2000, disebutkan bahwa Provinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas 6(enam) wilayah administratif yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2007 telah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Serang dengan dibentuk dan ditetapkannya Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 pada tanggal 10 Agustus 2007 dan pada tahun 2008 telah dibentuk daerah otonom baru yaitu pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang dengan telah dibentuk dan ditetapkannya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008 tanggal 26 November 2008. Dengan demikian wilayah administrasi Provinsi Banten bertambah dua yakni Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, sehingga secara keseluruhan Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota.

2.2.1. Kondisi Umum

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan. Pencapaian pembangunan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan pada periode 2003-2008 bertitik tolak dari penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2001. Pembentukan pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diawali dengan terbentuknya DPRD Provinsi Banten, dan selanjutnya melalui proses pemilihan di lingkungan DPRD Provinsi Banten ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk memimpin jalannya pemerintahan. Dalam membantu Gubernur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, maka ditetapkan perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (melalui 11 Biro), Sekretariat DPRD, 7 Badan, 12 Dinas dan 4 Kantor, dimana legalitas atas kedudukan serta tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Daerah serta Keputusan Gubernur Banten.

Sejalan dengan terjadinya perubahan kebijakan di tingkat pusat, maka pada tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Banten disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Tahun 2008, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten terdiri dari 1

Sekretariat Daerah (8 Biro), 1 Sekretariat DPRD, 16 Dinas Daerah, 12 Lembaga Teknis Daerah, 1 Polisi Pamong Praja, 1 RSUD Malingping, dan 27 Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam implementasinya, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah periode 2003-2008 antara lain seperti belum efektifnya penetapan struktur kelembagaan perangkat daerah, masih dirasakannya tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah, belum optimalnya penetapan dan pemilahan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta belum optimalnya hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah.

Aparatur. Pada tahun 2008, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 3.223 orang, dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 2.225 orang (69,14%) dan perempuan 998 orang (30,96%). Pola penempatan pegawai terorientasi di lingkungan Dinas-Dinas 52,11%, kemudian di lingkungan Badan, Lembaga & Kantor 26,95%, serta di lingkungan Sekretariat Daerah 20,94%. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2007 menunjukkan kondisi 906 PNS (33,38% dari jumlah seluruh PNS) memiliki tingkat pendidikan non kesarjanaan (tamatan SD hingga D.II).

Prasarana dan Sarana Pemerintahan. Selama periode 2002-2008 pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) masih dalam tahap penyelesaian. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sudah dapat diselenggarakan pada gedung-gedung di kawasan tersebut dan di lingkungan Kantor Gubernur, serta masih terdapat beberapa SKPD saja yang masih sewa. Sementara itu, berdasarkan informasi dari berbagai perangkat daerah, dukungan sarana dalam menunjang pelaksanaan operasional kantor maupun operasional lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.

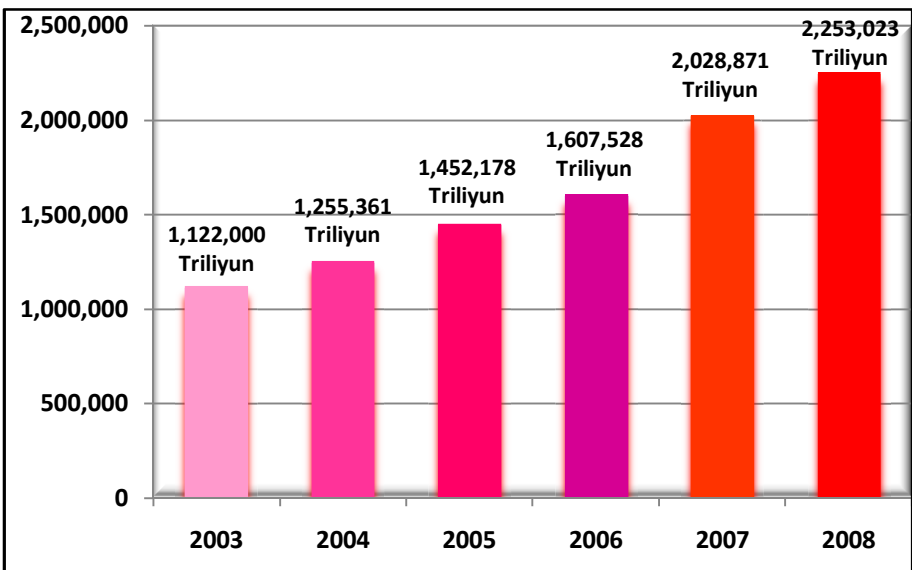
Keuangan Daerah. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2003-2008 semakin menunjukkan penguatan kapasitas, dimana dari Rp. 1,118 Trilyun pada tahun 2003 telah berhasil ditingkatkan menjadi Rp.2,350 Trilyun hingga tahun 2008. Penguatan kapasitas tersebut ditandai dengan rata-rata pencapaian target yang sebesar 102,66% per tahun serta dengan rata-rata laju pertumbuhan 13,53% per tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan peran besar terhadap penguatan kapasitas pendapatan daerah. Kinerja PAD pada sisi pertumbuhannya bergerak dengan rata-rata 24,89% per tahun (dengan kecenderungan menurun), dimana dari Rp. 0,614 Trilyun pada tahun 2003 telah dapat ditingkatkan menjadi Rp.1,660 Trilyun hingga tahun 2008. Suatu prestasi yang menggembirakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten, dimana realisasi nilai PAD pada tahun 2008 mampu ditingkatkan lebih dari dua setengah kali lipat dari nilai PAD tahun 2002. Demikian halnya dengan kinerja PAD berdasarkan sisi kontribusi terhadap total pendapatan daerah ditunjukkan dengan peranan yang sebesar 54,95% pada tahun 2003 dan terus bergerak hingga menjadi 70,63% hingga tahun 2008.

Belanja daerah menunjukkan perkembangan kapasitas pembiayaan pembangunan yang semakin memadai, dimana jumlah dan proporsi belanja pembangunan (belanja publik) dalam struktur belanja daerah mengalami peningkatan. Alokasi belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp.1,122 Trilyun (2003) telah dapat ditingkatkan menjadi Rp.2,253 Trilyun pada tahun 2008. Adapun permasalahan pokok dalam

penerapan belanja daerah selama kurun waktu 2003-2008 adalah belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta masih terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.

**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROVINSI BANTEN
2003-2008**



Perencanaan Pembangunan. Perubahan paradigma dan pola perencanaan pembangunan seiring dengan diterbitkannya UU 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004 telah diupayakan untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam tahun-tahun terakhir ini. Permasalahan pokok dalam bidang perencanaan pembangunan antara lain masih lemahnya koordinasi pembangunan antara provinsi dengan kabupaten/kota, masih belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, belum terkoordinasi dan terpadunya database perencanaan pembangunan daerah, belum berjalan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara efektif dan tepat sasaran, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan antar instansi terkait juga belum berjalan dengan baik.

Otonomi Daerah. Selama periode 2003-2008 berbagai tuntutan terhadap pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) berkembang di lingkungan masyarakat. Pembentukan Kota Serang yang telah memenuhi kaidah peraturan perundangan maupun teknis pada tahun 2007 telah dapat direalisasikan, selanjutnya pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Tangerang telah terbentuk pada tahun 2008. Wacana pembentukan Kabupaten Banten Selatan serta wacana untuk dapat mengelola Kepulauan Seribu (dari DKI Jakarta) merupakan aspirasi dan harapan yang perlu direspon untuk dinilai terhadap ketepatan dan kelayakannya secara normatif maupun teknis. Sehingga proses pembentukan daerah otonom baru tidak sekedar mempertimbangkan aspek politis dan kemauan sebagian kecil elite daerah.

Politik, Hukum serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat yang ditandai dengan berlakunya sistim multi partai telah ditunjukkan pada Pemilu tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik, hasilnya 13 partai politik telah memperoleh kursi di DPRD Provinsi Banten periode 2004-2009 dan secara umum berlangsung aman dan tertib. Antusias masyarakat berpolitik juga

cukup baik, dimana Pemilu 2004 diikuti oleh 6.207.919 pemilih. Keterbukaan dan keterakomodasian hak-hak rakyat dalam berpolitik yang semakin membaik ini juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan Pilkada di Kota Cilegon (2005), Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang (2006), Kabupaten Tangerang (2007), dan Kota Serang (2008) yang secara umum juga berlangsung secara aman dan tertib.

Disamping itu munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, merupakan bentuk pencapaian dalam mewujudkan proses demokratisasi. Hingga tahun 2008 jumlah organisasi kemasyarakatan telah berkembang menjadi 97 ormas, yang terdiri dari 21 lembaga profesi, 26 lembaga keagamaan dan 50 lembaga swadaya masyarakat.

Munculnya berbagai aspirasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik yang bersifat mendukung ataupun memberikan kritik membangun, disampaikan langsung ataupun melalui lembaga perwakilan (legislatif), merupakan cerminan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan politik dan nilai-nilai demokrasi. Penyampaian aspirasi masyarakat selama tahun 2003-2008 sejauh ini dapat ditanggulangi dengan tertib serta mengedepankan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan yang serius.

Berbagai kerentanan dan kerawanan sosial merupakan sumber-sumber permasalahan masyarakat yang masih dihadapi yang dapat berdampak pada terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang lazim dipicu oleh adanya kesenjangan sosial. Demikian halnya dengan kejadian luar biasa baik yang bersifat bencana alam, wabah penyakit, hingga kerusuhan sosial masih menjadi ancaman yang memerlukan kewaspadaan dan kesiapan untuk penanganannya.

2.2.2. Tantangan

Berdasarkan kondisi dan potensi pembangunan pada aspek pemerintahan yang terdapat di Provinsi Banten serta dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan di masa mendatang, maka diidentifikasi beberapa tantangan kedepan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus lebih mengutamakan pelayanan yang optimal terhadap kepentingan masyarakat, dengan dukungan kelembagaan yang berkualitas, aparatur yang profesional dan prasarana sarana yang memadai.
- b. Menghapus budaya kolusi, korupsi dan nepotisme aparatur pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Pendapatan daerah yang dapat mengimbangi pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan permasalahan obyektif serta kebutuhan masyarakat dan wilayah.
- d. Masyarakat yang dapat berperan aktif dalam kehidupan berpolitik dan kehidupan berdemokrasi, dengan tetap saling menghargai dan saling menghormati terhadap pendapat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga stabilitas politik dan kehidupan berdemokrasi tetap terjaga.

- e. Adanya partisipasi dari peran dan fungsi organisasi sosial dan organisasi politik dengan menerapkan sistim kebersamaan dalam membantu kelancaran, keterarahan dan ketertiban pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peraturan – peraturan hukum yang berlaku yang disusun harus benar-benar tepat waktu, tepat materi dan berkualitas.
- g. Masyarakat umum dan masyarakat lingkungan pemerintah daerah mengetahui, memahami dan mematuhi serta mengimplementasikan peraturan – peraturan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

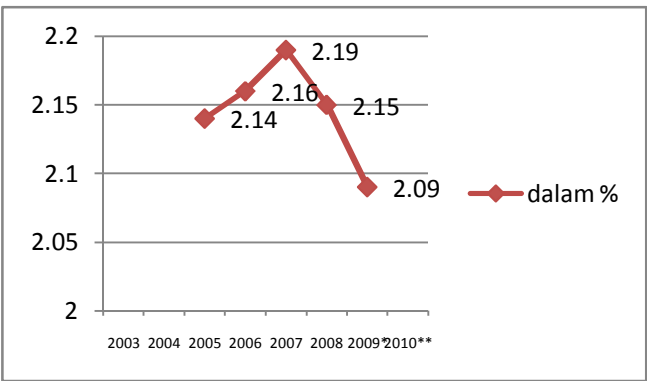
2.3. KONDISI DAN TANTANGAN ASPEK SOSIAL BUDAYA

Pembangunan di bidang sosial budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

2.3.1. Kondisi Umum

Kependudukan. Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, jumlah penduduk di Provinsi Banten telah berkembang menjadi dua kali lipat lebih, yaitu dari 4.015.837 jiwa (1980) menjadi 9.308.944 jiwa (2005) atau dengan laju pertumbuhan 131,81% (secara rata-rata 5,37% per tahun). Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut terutama dipengaruhi oleh bertumbuhkembangnya kawasan industri dan perkotaan (khususnya di wilayah utara) yang mendorong arus migrasi dan urbanisasi. Hal tersebut tercermin dari pergeseran proporsi jumlah penduduk di wilayah utara yang semula hanya sebesar 65,70% (1980) menjadi 75,87% (2005). Pada tahun 2008 jumlah penduduk di Provinsi Banten telah bertambah menjadi 9.602.445 jiwa dengan laju 2,15%, sedangkan pada tahun 2009 menurut BPS jumlah penduduk Provinsi Banten diperkirakan meningkat 2,09% atau menjadi 9.782.400 jiwa, dan direncanakan pada bulan Mei 2010 akan dilaksanakan SENSUS Penduduk 2010.

Grafik; Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Provinsi Banten, 2003-2008



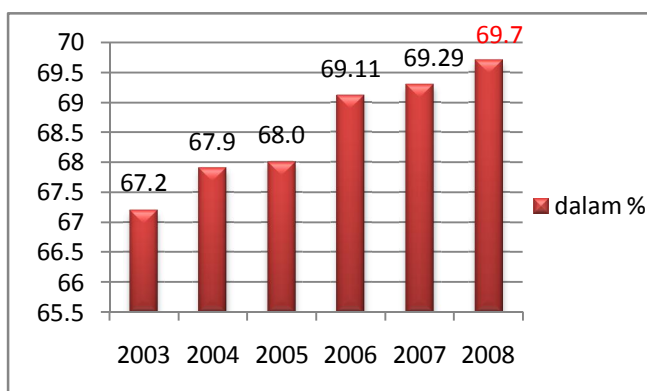
Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Banten kurun waktu 2000-2008 rata-rata tumbuh sebesar 2,15%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan pertumbuhan antara tahun 1990-2000 yang rata-rata tumbuh sebesar 3,21%. Sedangkan kepadatan penduduk telah mencapai 1.065 jiwa/km², dimana kesenjangan kepadatan penduduk antara wilayah utara dan selatan cukup mencolok yaitu antara 2.209 jiwa/km² dengan 396 jiwa/km². Hingga tahun 2008, komposisi jumlah penduduk terdiri dari 50,5% laki-laki dan 49,5% perempuan. Sebesar 65,81% penduduk termasuk dalam kategori usia produktif (15 - 65 tahun), sedangkan 34,19% lainnya termasuk kategori usia tidak produktif yang terdiri dari 30,93% penduduk usia

<15 dan 3,23% penduduk usia > 65 tahun. Adapun jumlah rumah tangga di Provinsi Banten pada tahun 2008 mencapai 2.289.839 KK.

Indeks Pembangunan Manusia.

Grafik; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Prov. Banten ,2003-2008

Pembangunan manusia selama periode 2003-2008 secara keseluruhan menunjukkan kemajuan sebagaimana ditunjukkan dengan pencapaian IPM dari 67,20 pada tahun 2003 menjadi 69,7 pada tahun 2008. Pencapaian IPM Provinsi Banten hingga tahun 2008 masih di bawah IPM Nasional yang sebesar 71,17. Pencapaian indeks daya beli (pengeluaran per kapita) dan indeks kesehatan merupakan faktor



utama yang mempengaruhi lambannya kemajuan kinerja pembangunan manusia di Provinsi Banten, dimana hingga tahun 2008 masing-masing baru mencapai 625.300 dan 66,0. Sedangkan pencapaian indeks pendidikan jauh lebih baik, yaitu telah mencapai angka rata-rata lama sekolah 8,1 dan angka melek huruf 95,6 pada tahun 2008.

Pendidikan. Rata-rata lama sekolah hingga tahun 2008 telah mencapai 8,1 tahun, angka ini tetap sama dengan data tahun 2007. Dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk dewasa telah menamatkan sekolah dasar (SD), tepatnya setingkat kelas 2 SLTP. Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun hingga tahun 2008 sebesar 91,25%, dengan demikian masih tersisa sebesar 8,75% penduduk usia >15 tahun yang buta huruf, dan ditargetkan menurun hingga 6,0% pada tahun 2012. Pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Banten menurut parameter angka partisipasi sekolah pada tahun 2008 yang meliputi kelompok usia 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun secara keseluruhan menunjukkan pencapaian yang masih dibawah pencapaian nasional. Pada dasarnya akses, mutu, dan manajemen pendidikan di Provinsi Banten belum optimal, termasuk permasalahan relevansi tamatan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan, peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta belum bertumbuhkembangnya minat dan budaya penerapan teknologi tepat guna.

Kesehatan. Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten menunjukkan kenaikan dari 62,6 tahun pada tahun 2003 meningkat menjadi 66,5 tahun pada tahun 2008, dengan demikian peluang hidup penduduk Banten bertambah rata-rata 0,65 per tahun. Dapat dikatakan rata-rata bayi yang lahir di Provinsi Banten pada tahun 2008 diharapkan dapat hidup sampai usia sekitar 66,5 tahun. Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan telah dapat diturunkan dari sebanyak 23,7% pada tahun 2003 menjadi 20,1% pada tahun 2006. Hingga tahun 2006 persentase pertolongan pertama kelahiran balita oleh tenaga kesehatan di Provinsi Banten baru mencapai 57,47%, dimana capaian tersebut cukup jauh bila dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 66,14%. Demikian halnya dengan persentase pertolongan akhir kelahiran balita oleh tenaga kesehatan yang mencapai 72,29%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya 62,29%. Selanjutnya, 88,75% rumah tangga di Provinsi Banten telah memperoleh akses terhadap air minum bersih dan sehat, sedangkan 11,27% lainnya masih mengkonsumsi air minum yang diperkirakan tidak memenuhi standar air bersih (sehat) seperti air yang berasal dari mata air, air sungai, air hujan dan air lainnya. Sementara itu, kejadian luar biasa penyakit masih menjadi ancaman bagi masyarakat seperti polio, diare, campak, demam berdarah, lumpuh layu, gizi buruk, serta termasuk ancaman wabah flu burung.

Kesejahteraan Sosial. Hingga tahun 2008, penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten masih menyisakan permasalahan 816.742 jiwa penduduk miskin atau sekitar 8,5% dari total penduduk, dimana 54,57% diantaranya merupakan penduduk miskin perdesaan dan 45,43% lainnya merupakan penduduk miskin perkotaan. Dibandingkan dengan data pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 tersebut mengalami penurunan sebesar 69.458 jiwa. Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin secara nasional yang mencapai 34,960 juta jiwa pada tahun 2008, maka 2,34% diantaranya berada di wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan data Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Edisi Maret 2008 (BPS, 2008) disebutkan bahwa garis kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.169.485,-/kapita/bulan, dimana angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan angka nasional yang sebesar Rp.166.697,-/kapita/bulan.

Kerawanan pangan turut menjadi bagian permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten sebagaimana perkembangan kasus pada akhir-akhir ini, meskipun tingkat ketersediaan pangan di Provinsi Banten dapat dikatakan cukup memadai. Dalam laporan Peta Kerawanan Pangan Indonesia 2005 (Dewan Ketahanan Pangan – Deptan 2005) disebutkan bahwa walaupun letaknya dekat ibukota nasional, Banten memiliki kantung-kantung rawan pangan yang disebabkan karena tidak memadainya pelayanan kesehatan.

Banyaknya keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2008 mencapai 91.438 keluarga, yang didominasi oleh keluarga fakir miskin berjumlah 387.292 keluarga (54,90%), keluarga yang menempati tempat tinggal yang tidak layak huni sebanyak 230.457 keluarga (32,67%), keluarga yang rentan sosial ekonomi berjumlah 78.299 keluarga (11,10%), dan keluarga yang bermasalah sosial psikologis berjumlah 9.352 keluarga (1,33%). Disamping itu, hingga tahun 2008 diidentifikasi PMKS di Provinsi Banten yang terdiri dari jiwa penyandang cacat, 77.646 jiwa wanita, 60.855 jiwa lanjut usia, 101.204 jiwa anak dan balita.

Saat ini di Provinsi Banten masih terdapat komunitas adat terpencil (KAT) yaitu Suku Baduy di Kabupaten Lebak yang berpenduduk 639 jiwa (Dinsosnaker, 2003). Hingga tahun 2008, jumlah penduduk Suku Baduy adalah sebanyak 10.350 Jiwa yang menempati lahan seluas 5.136,58 Ha (Tanah Ulayat berdasarkan Perda Kabupaten Lebak No.32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan SK Bupati Lebak No.590 Tahun 2002) terdiri dari 2 kelompok yaitu: Baduy Luar terdiri dari 58 Kampung, dan Baduy Dalam terdiri dari 3 Kapuunan atau Tilu Tangtu (Tangtu Cikeusik, Tangtu Cikertawana, Tangtu Cibeo). Suku Baduy merupakan suatu komunitas tertutup terhadap pengaruh pembangunan dan modernisasi, namun memiliki kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan dengan bertumpu pada sumberdaya alam. Namun demikian, keunikan Suku Baduy merupakan *trademark* tersendiri bagi Provinsi Banten yang memerlukan perlindungan dan penghargaan atas keberadaan dan keberlangsungan komunitasnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketersediaan dan keragaman sumberdaya alam di Provinsi Banten belum memberikan manfaat sepenuhnya bagi masyarakat. Hal tersebut setidaknya tercermin dari 816.742 jiwa penduduk miskin hingga tahun 2008, sehingga kondisi ini mencerminkan keberdayaan masyarakat masih relatif rendah. Sementara itu, berdasarkan informasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (17 April 2006) hingga tahun 2006 tercatat sebanyak 764 desa atau 51,52% terhadap jumlah desa/kelurahan di Provinsi Banten tergolong dalam desa tertinggal, yang terdiri dari 458 desa tertinggal di daerah tertinggal dan 306 desa tertinggal di daerah non tertinggal. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dalam hal ini termasuk dalam kategori kawasan tertinggal, dimana

dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, kedua kabupaten tersebut termasuk dalam prioritas lokasi penanganan wilayah-wilayah tertinggal 2004-2009.

Pemberdayaan Perempuan. Kualitas SDM perempuan dari berbagai ukuran masih menunjukkan keteringgalan bila dibandingkan dengan kualitas SDM laki-laki di Provinsi Banten. Sebagai contoh, persentase penduduk perempuan melek huruf berusia 15 tahun keatas hingga tahun 2008 baru mencapai 90,25%, sedangkan laki-laki 93,50%. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan baru mencapai 7,1 tahun, sedangkan laki-laki 8,3 tahun. Demikian halnya peranan perempuan dalam pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah penyerapan tenaga kerja perempuan yang mencapai 46,26 pada tahun 2008, sedangkan penyerapan tenaga kerja laki-laki 83,07. Di bidang politik, jumlah anggota legislatif perempuan pada DPRD Provinsi Banten hanya 6 orang dari 75 orang anggota atau sebesar 8%, sedangkan untuk periode tahun 2009-2014 terjadi penambahan proporsi jumlah anggota perempuan yaitu sebanyak 15 orang dari 85 orang anggota atau sebesar 17,65% (dalam UU No. 12 Tahun 2003 diamanatkan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pencalonan anggota legislatif), dan proporsi jumlah perempuan PNS yang menduduki jabatan eselon I dan II hanya sekitar 6%.

Kebudayaan. Karakteristik sosial budaya masyarakat Provinsi Banten tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Banten sebagai pusat penyebaran Agama Islam dan identik dengan budaya ke-Islam-annya. Budaya yang bernafaskan Islam ini sangat mewarnai kehidupan keseharian masyarakat Banten. Sebagai salah satu ukuran, hingga tahun 2008 di Provinsi terdapat 2.824 Pondok Pesantren (tingkat *Ula*, *Wustha*, dan *Salafiyah*) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah Santri sebanyak 181.636 orang. Secara umum, kehidupan keagamaan masyarakat Banten sudah sangat kondusif, dimana secara kuantitas jumlah tempat peribadahan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan hari-hari besar agama juga dapat berjalan baik. Secara kualitas, kerukunan antar umat beragama juga relatif baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama.

Namun seiring dengan semakin perkembangan wilayah dan pembangunan, masyarakat Banten menjadi semakin terbuka terhadap masuknya pendatang-pendatang baru dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kondisi ini berpeluang menimbulkan tumbuhnya eksek negatif yang menyebabkan menjadi tidak kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Banten. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif, melalui penguatan kembali nilai-nilai budaya lokal (*subsidiarity*) merupakan hal yang perlu untuk terus diupayakan.

Sementara itu, apresiasi masyarakat terhadap produk-produk seni dan budaya tradisional cenderung menurun. Degradasi nilai-nilai moral dan budaya semakin bertumbuhkembang seiring dengan derasnya pengaruh budaya asing akibat globalisasi melalui berbagai macam media, terutama budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai budaya sendiri

2.3.2. Tantangan

Berdasarkan kondisi dan potensi pembangunan pada aspek sosial budaya yang terdapat di Provinsi Banten serta dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan sosial budaya di masa mendatang, maka diidentifikasi beberapa tantangan kedepan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

- a. Membentuk karakter dan jatidari masyarakat yang agamis dan berbudaya dengan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Menjaga, melindungi dan melestarikan nilai-nilai luhur agama dan budaya agar terhindar dari kepunahan dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan budaya daerah.
- c. Menciptakan pola perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat.
- d. Mengatasi masalah kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.
- e. Menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan, menurunkan jumlah penduduk buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat.
- f. Memberdayakan potensi masyarakat dalam pengembangan orientasi pendidikan yang bersifat modern dengan pola kemitraan dan pemanfaatan iptek.
- g. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berwawasan iptek.
- h. Menyiapkan sumberdaya pemuda yang berdaya saing dengan didukung oleh keterampilan, idealisme maupun nilai budaya yang mantap.
- i. Menghapus stigma negatif di masyarakat yang menganggap perempuan merupakan mahluk lemah, porsi perempuan adalah rumah, perempuan merupakan objek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan.
- j. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan penduduk.
- k. Meningkatkan kualitas dan derajat kehidupan masyarakat miskin.
- l. Mengendalikan jumlah pengangguran seiring dengan meningkatnya angkatan kerja.

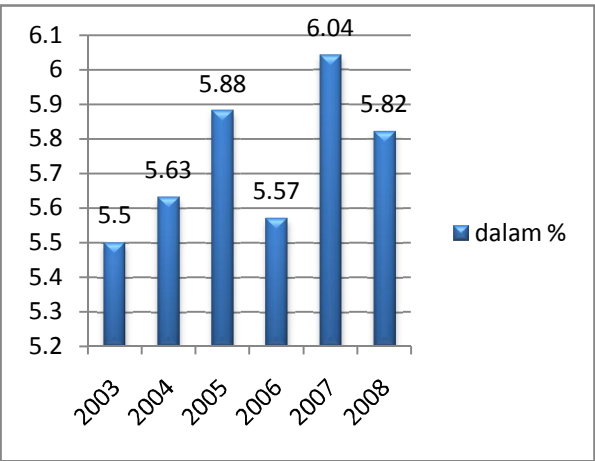
2.4. KONDISI DAN TANTANGAN ASPEK PEREKONOMIAN

2.4.1. Kondisi Umum

PDRB dan LPE. Proses perbaikan kondisi umum perekonomian Provinsi Banten selama periode 2003-2008 ditunjukkan dengan peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp. 66,87 Trilyun (2003) menjadi Rp.122,497 Trilyun (2008). Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai PDRB atas dasar harga konstan (2000) bergerak dari Rp. 51,96 (2003) menjadi Rp.68,83 Trilyun (2008). Hal yang menggembirakan adalah bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten selama periode 2003-2008 mampu bergerak secara positif dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. LPE pada tahun 2002 yang sebesar 4,11%, bergerak menjadi 5,07% (2003), 5,63% (2004), 5,88 (2005), 5,57

(2006), 6,04% (2007), hingga pada tahun 2008 berada pada angka 5,82%. Perkembangan LPE tersebut diperkirakan terus berlanjut pada masa mendatang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di Provinsi Banten semakin menunjukkan kemajuan. Akibat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, telah terjadi penurunan.

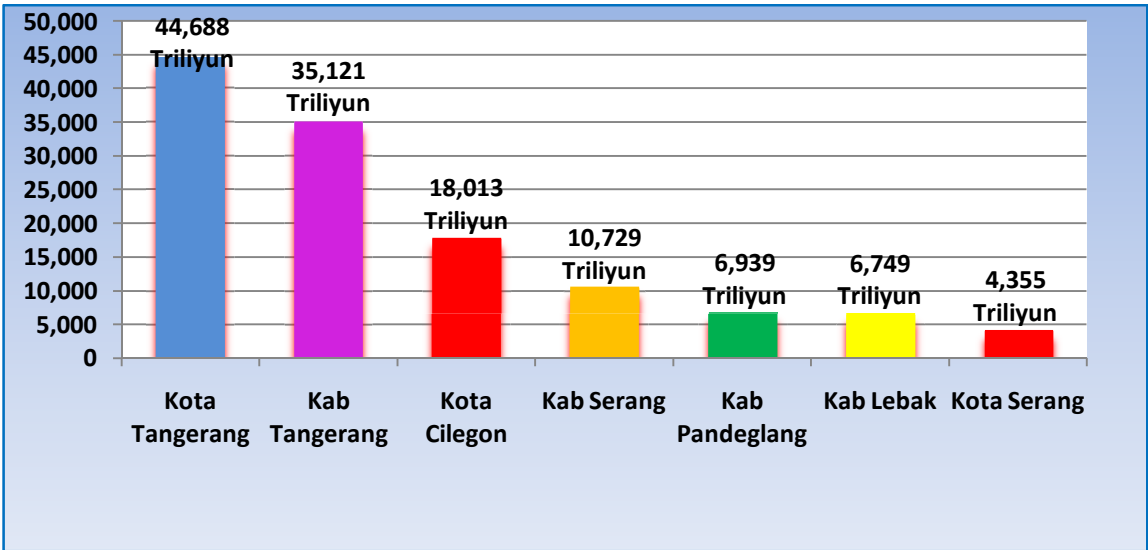
Dalam konteks nasional, rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama periode 2003-2006 senantiasa berada diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional, namun pada tahun 2007 pencapaian LPE Provinsi Banten sebesar 6,04 berada dibawah angka LPE Nasional sebesar 6,30%, hal ini terus terjadi hingga tahun 2008 LPE Provinsi Banten sebesar 5,82 masih di bawah LPE Nasional sebesar 6,1%. Walaupun demikian, secara keseluruhan hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Provinsi Banten masih memiliki daya saing yang cukup baik pada tingkat nasional.



Grafik ; Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten 2003-2008

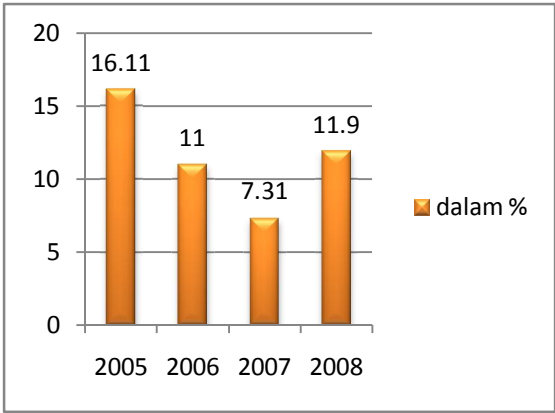
Bila melihat perkembangan PDRB kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang merupakan kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Banten. Sebagai gambaran, pada tahun 2008 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tangerang mencapai Rp 44,688 Trilyun dan Kabupaten Tangerang Rp 35,121 Trilyun. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku Kota Cilegon pada tahun yang sama sebesar Rp 18,013 Trilyun dan Kabupaten Serang mencapai Rp 10,729 Trilyun. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang pada tahun yang sama memiliki pencapaian nilai PDRB atas dasar harga berlaku terendah, yaitu masing-masing Rp 6,939 Trilyun, Rp 6,749 Trilyun, dan Rp 4,355 Trilyun. Berdasarkan perkembangan PDRB kabupaten/kota tersebut seolah menggambarkan cluster perekonomian wilayah yang dapat diklasifikasikan dengan 'daerah sangat berkembang' (Kabupaten dan Kota Tangerang), 'daerah berkembang' (Kota Cilegon dan Kabupaten Serang) serta 'daerah sedang berkembang' (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang).

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kota / Kabupaten di Wilayah
Provinsi Banten
2008**



Catatan: Data Kota Tangerang Selatan s.d Tahun 2008 masih tergabung dengan Kabupaten Tangerang

Inflasi. Perkembangan perekonomian Provinsi Banten selama kurun waktu 2003-2007 ditandai dengan pergerakan laju inflasi yang berfluktuasi. Laju inflasi terendah, terjadi pada Grafik Inflasi Provinsi Banten tahun 2003 dimana inflasi mencapai 5,21%. Faktor kenaikan BBM pada Bulan Maret dan Oktober 2005 berdampak sangat signifikan bagi meningkatnya laju inflasi hingga mencapai posisi tertinggi selama periode 2003-2007, dimana tergambar dengan jelas pada laju inflasi yang terjadi di tahun 2005 yang besarnya mencapai 16,11%. Namun pada tahun 2006, laju inflasi Provinsi Banten kembali menurun yakni menjadi sebesar 7,67%. Demikian halnya dengan tahun 2007, inflasi Provinsi Banten kembali menurun nilainya mencapai 7,31%, dan tahun 2008 menjadi 11,90%.



Grafik: Inflasi, Provinsi Banten 2005-2008

Investasi. Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tidak lepas dari perkembangan investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) yang bertumbuh dari tahun ke tahun dengan laju rata-rata 13,97% per tahun. Struktur investasi di Provinsi Banten ditunjukkan dengan komposisi investasi swasta dan masyarakat yang sebesar 68,30% serta investasi pemerintah 31,70%. Investasi swasta dan masyarakat terdiri dari PMA dan PMDN yang masing-masing berkontribusi 21,30% dan 14,31%, sedangkan peranan investasi UMKMK sebesar 32,69%. Sedangkan investasi pemerintah terdistribusi dalam dana APBN (10,39%), dana APBD Provinsi Banten (6,77%) serta dana APBD kabupaten/kota (14,54%).

Sektor Ekonomi. Hingga tahun 2008, struktur perekonomian Provinsi Banten dicirikan dengan dominasi peran sektor sekunder (manufaktur) yang mencapai 52,56%, dimana kontribusi tersebut telah mengalami penyusutan dari 55,65% pada tahun 2003, dengan rata-rata penurunan 0,62% per tahun (2003-2008). Peran sektor sekunder terutama dipengaruhi oleh eksistensi kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan yang masih mencapai 45,25% terhadap perekonomian Banten hingga tahun 2008. Posisi geostrategis beserta dukungan prasarana dan sarana, khususnya di wilayah utara telah mendorong bertumbuhkembangnya 32 kawasan industri, dan saat ini tersebar 1.846 unit industri di wilayah Provinsi Banten. Kinerja industri pun cenderung meningkat sebagaimana ditunjukkan dari nilai tambah industri dari Rp. 30,30 trilyun (2002), Rp.40,82 trilyun (2004), dan menjadi Rp 60,710 Trilyun (2008). Meskipun demikian, kegiatan industri pengolahan di Provinsi Banten masih dicirikan dengan tingginya kandungan impor yang mengakibatkan rentannya biaya produksi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah yang mengalir pada perekonomian domestik.

Sementara itu, sektor tersier (*service*) dari tahun ke tahun semakin menguatkan posisinya dalam struktur ekonomi Provinsi Banten, dimana dari 32,52% pada tahun 2003 menjadi 38,95% pada tahun 2008 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,07% per tahun selama periode 2003-2008. Geliat sektor tersier dalam struktur ekonomi Provinsi Banten tersebut merupakan alasan utama terhadap kecenderungan penurunan kontribusi sektor sekunder maupun primer. Kegiatan perdagangan (besar dan eceran) memberikan peran paling penting terhadap kinerja sektor tersier, antara lain disebabkan oleh aktifitas Pelabuhan Banten yang merupakan salah satu dari 6 pelabuhan di Pulau Jawa dengan volume dan nilai ekspor tertinggi dan merupakan salah satu dari 10 pelabuhan di tingkat nasional dengan volume angkutan tertinggi (Dephub).

Nilai ekspor menurut pelabuhan-pelabuhan utama di Provinsi Banten meningkat dari US\$ 538,01 juta (2003) menjadi US\$ 579,86 juta (2007), demikian halnya nilai impor dari US\$ 1.816,62 juta (2003) menjadi US\$ 4.827,42 juta.

Sektor primer sendiri mengalami kecenderungan penurunan kontribusi dengan rata-rata sebesar 0,25% per tahun dalam periode yang sama, sehingga dari 9,30% kontribusinya pada tahun 2003 menurun menjadi 8,5% pada tahun 2008. Kendati demikian, sektor primer masih menjadi tumpuan dalam penyerapan tenaga kerja (21,83% hingga tahun 2008). Pertanian tanaman pangan (khususnya padi) masih merupakan basis kegiatan pada sektor primer, dengan perkembangan produksi dan produktivitas yang menunjukkan kecenderungan peningkatan, dimana produksi padi dari 1.468.765 ton (2002) menjadi 1.816.140 ton (2007), sementara produktivitas produksi padi dari 43,37 kwintal/ha (2002) menjadi 50,90 kwintal/ha (2007). Lumbung-lumbung pangan terutama tersebar di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak dan Tangerang. Kegiatan perkebunan khususnya berkembang di Wilayah Selatan baik yang dikelompokkan dalam perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat, dengan komoditas unggulan meliputi kakao, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Sementara itu, potensi kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal, antara lain tercermin dari tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah perairan laut Kabupaten Pandeglang yang baru mencapai 82,09%, disamping itu peluang pengembangan budidaya perikanan masih sangat dimungkinkan, meliputi budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, tambak, lahan sawah, kolam, serta keberadaan perairan umum (sungai, waduk, situ).

Perkembangan kontribusi sektor tersier juga sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhannya dengan angka rata-rata 8,00% per tahun selama periode 2003-2007 yang sekaligus menempatkan sebagai sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi, bahkan satu-satunya yang berada diatas laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Banten (5,64% per tahun). Fenomena tersebut terutama didorong oleh laju pertumbuhan rata-rata lapangan usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mencapai 21,13% dalam periode yang sama, yang merupakan yang tertinggi diantara 9 (sembilan) lapangan usaha yang ada. Disamping itu, laju pertumbuhan rata-rata lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi menempati urutan kedua, yaitu mencapai 8,29%. Sektor sekunder dan sektor primer dalam periode yang sama hanya memiliki laju pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar 5,78% dan 2,26%. Hanya saja, sektor sekunder masih memiliki kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan, sebagaimana pada tahun 2007 yang sebesar 8,40%, dimana hal ini dipicu oleh laju pertumbuhan lapangan usaha Bangunan (mencapai 13,10%) dan lapangan usaha Listrik, Gas, dan Air Bersih (mencapai 4,73%).

Tenaga Kerja. Sementara itu, kondisi penduduk yang bekerja berdasarkan sektor-sektor ekonomi hingga tahun 2007 dicirikan dengan dominasi penduduk bekerja pada sektor-sektor tersier (57%). Sedangkan penduduk bekerja pada sektor-sektor primer dan sektor-sektor sekunder memiliki komposisi yang hampir berimbang, yaitu masing-masing 22% dan 21%, sehingga secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang tidak sejalan dengan komposisi nilai ekonomi masing-masing sektor. Bila ditinjau berdasarkan klasifikasi 9 (sembilan) sektor, ternyata bahkan Sektor Pertanian masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja tertinggi (22,43%) hingga tahun 2007, dimana komposisi tersebut berada di atas tingkat penyerapan tenaga kerja pada Sektor Industri Pengolahan (20,54%). Beberapa sektor lainnya yang memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten adalah Sektor Perdagangan Hotel dan

Restoran, Sektor Jasa-jasa dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dimana masing-masing memiliki komposisi tingkat penyerapan sebesar 20,58%, 12,48% dan 8,69% pada tahun 2007.

Sektor pertambangan dan penggalian mampu menyerap tenaga kerja secara lebih baik dibandingkan sektor-sektor lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio kontribusi ekonomi terhadap kontribusi penduduk bekerja yang sebesar 5,55, sehingga sektor ini merupakan sektor yang paling bersifat padat karya. Kecenderungan sektor padat karya lainnya ditunjukkan oleh sektor jasa-jasa (dengan nilai rasio 2,91), sektor pertanian (2,87), sektor bangunan (1,57), sektor perdagangan hotel dan restoran (1,20), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (1,05). Sedangkan sektor-sektor dengan kecenderungan padat modal yang diindikasikan dengan kontribusi ekonomi yang lebih besar dari kontribusi penduduk bekerja antara lain ditunjukkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (dengan nilai rasio 0,08), sektor industri pengolahan (0,50), dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,75).

Pada kenyataannya, perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tidak sebaik perkembangan penyerapan tenaga kerja. Sebagai gambaran, LPE yang mencapai angka 5,07% pada tahun 2003 ternyata hanya diiringi oleh pertumbuhan penduduk bekerja (usia 15 tahun ke atas) yang sebesar 2,32%. Demikian halnya untuk tahun 2007, dimana pertumbuhan penduduk bekerja hanya sebesar 2,81% dengan LPE 6,04%. Masih rendahnya kemampuan umum sektor-sektor ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja juga tercermin dari perkembangan tingkat pengangguran terbuka dari 17,45% tahun 2003, kemudian menurun hingga menjadi 15,75% pada tahun 2007. Meskipun demikian, faktor lain yang turut mempengaruhi buruknya kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten adalah tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang sempat mencapai angka 11,23% pada tahun 2004, terutama dipengaruhi oleh faktor migrasi masuk, yaitu banyaknya penduduk pencari kerja yang datang dari luar daerah seiring dengan keberadaan kawasan industri yang berkembang di wilayah utara Provinsi Banten.

PDRB Per Kapita dan Daya Beli. Pembangunan ekonomi Provinsi Banten selama periode 2003-2007 secara perlahan telah mendorong proses perbaikan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan PDRB Per Kapita dari Rp. 7,78 Juta pada tahun 2003 telah dapat ditingkatkan menjadi Rp. 10,61 Juta hingga tahun 2006, dan pada tahun 2007 angkanya mencapai Rp. 11,40 Juta. Indeks daya beli masyarakat juga terus mengalami peningkatan dari 58,2 pada tahun 2003 menjadi 59,9 pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 60,1. Meskipun cenderung meningkat, indeks daya beli hingga saat ini masih merupakan komponen dengan pencapaian terendah dibandingkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan sebagai komponen lainnya pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM). Distribusi pendapatan yang terjadi di Banten secara umum merata, dimana angka gini ratio pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,29 mengalami perbaikan dari tahun 2003 yang sebesar 0,32. Ketimpangan pendapatan penduduk terbesar terjadi di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang dimana keduanya memiliki angka gini rasio sebesar 0,27.

2.4.2. Tantangan

Berdasarkan kondisi dan potensi pembangunan pada aspek perekonomian yang terdapat di Provinsi Banten serta dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian di masa mendatang, maka diidentifikasi beberapa tantangan kedepan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara berkelanjutan sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kepastian hukum investasi sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan daya saing iklim investasi.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kinerja UMKM sehingga mampu menjadi pendukung pengembangan usaha besar.
- d. Meningkatkan akses yang memadai terhadap seluruh pelaku ekonomi terutama UMKM terhadap pengelolaan sumberdaya produktif sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.
- e. Memperkuat struktur dan basis perekonomian domestik yang bertumpu pada sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa sehingga mampu meningkatkan kemandirian, kemajuan, dan ketahanan ekonomi daerah dan masyarakat.
- f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian.
- g. Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya lokal sebagai input pengembangan industri sehingga mampu bersaing di pasar global.

2.5. KONDISI DAN TANTANGAN ASPEK PRASARANA DAN SARANA

2.5.1. Kondisi Umum

Transportasi. Dalam rangka mendukung mobilitas manusia maupun koleksi dan distribusi barang, khususnya antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, jaringan jalan nasional dan provinsi yang semula tersedia sepanjang 862,65 km pada tahun 2005, yang terdiri dari 490,40 km (56,85%) jalan nasional dan 372,25 km (43,15%) jalan provinsi telah mampu ditingkatkan menjadi 1.379,41 km pada tahun 2007, yang terdiri dari 490,40 km (35,55%) jalan nasional dan 889,01 km (64,45%) jalan provinsi. Pertumbuhan panjang jalan negara dan provinsi selama periode 2003-2007 adalah sebesar 60,16% atau bertambah sepanjang 518,13 km. Pertumbuhan panjang jalan yang sangat signifikan tersebut dikarenakan pada tahun 2006, melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.8-Huk/2006, tanggal 2 Februari 2006 ditetapkan status jalan provinsi pada sistem jaringan jalan di Provinsi Banten sesuai dengan peranan dan fungsi jalan, mengubah panjang jalan provinsi menjadi 889,01 km dari semula 372,25 km. Disamping itu, keberadaan ruas Jalan Tol Merak-Jakarta sepanjang 90,00 km memberikan peran penting dalam menghubungkan kota-kota di wilayah Banten dengan wilayah luar.

Dari seluruh jalan yang dikelola baik jalan Provinsi maupun negara pada tahun 2007, hanya 623,520 km (54,80%) dalam kondisi baik, sepanjang 429.890 km (35,73%) dalam kondisi sedang dan sisanya 326 km jalan negara dan Provinsi atau 9,47 % dalam kondisi rusak. Berdasarkan klasifikasi kelas jalan, jalan negara kelas II sebesar 23,15% kelas IIIA sebesar 13,08%, kelas IIIB sebesar 56,67% dan tidak dirinci sebesar 7,10%. Sedangkan jalan Provinsi kelas IIIA sebesar 8,41%, kelas IIIB sebesar 22,09%, dan sisanya 69,49% kelas yang tidak dirinci.

Beberapa jaringan jalan di wilayah Provinsi Banten merupakan dari sistem jaringan jalan Jawa-Bali yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana hasil kesepakatan bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Di Yogyakarta dan Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 18 Februari 2004, antara lain meliputi:

- a. Jaringan jalan di lintas selatan yang menghubungkan kota-kota **Labuan - Malingping** - Pelabuhan Ratu - Jampang Kulon - Pamengpeuk - Pangandaran - Cilacap - Kebumen - Yogyakarta - Pacitan - Tulungagung - Jember - Banyuwangi;
- b. Jaringan jalan di jalan lintas utara yang menghubungkan kota-kota **Merak - Tangerang** - Jakarta - Cirebon - Tegal - Semarang - Tuban - Surabaya - Pasuruan - Situbondo – Banyuwangi.

Hingga tahun 2008, setiap km² pada wilayah Provinsi Banten secara rata-rata tersedia jaringan jalan negara dan provinsi sepanjang 160 m (0,16 km). Tingkat ketersediaan jaringan jalan negara dan provinsi di wilayah utara (0,11 km/km²) lebih memadai daripada di wilayah selatan (0,09 km/km²). Ruas jalan nasional di wilayah Provinsi Banten saat ini dirasakan tingkat pelayanannya masih rendah dengan rasio volume lalu lintas per kapasitas rata-rata sebesar 0,70 yang berarti kelancaran arus lalu lintas terganggu. Sedangkan kinerja pelayanan jalan pada ruas jalan provinsi umumnya cukup baik, hal ini dapat tercermin dari kelancaran arus lalu lintas antar ibukota Kabupaten/Kota yang diindikasikan dengan rasio volume lalu lintas per kapasitas rata-rata sebesar 0,4.

Jumlah kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sampai saat ini sebanyak 8.795 kendaraan dengan jumlah sebanyak 178 trayek yang terdiri dari 5.224 kendaraan antar kota dalam provinsi dan 357 kendaraan antar kota perbatasan provinsi. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang ada saat ini dilayani dengan kendaraan ukuran besar. Jumlah kendaraan angkutan antar kota antar provinsi sampai saat ini sebanyak 1.940 kendaraan dengan jumlah sebanyak 183 trayek yang merupakan asal dan atau tujuan Provinsi Banten. Selain itu, pilihan moda transportasi lainnya adalah keberadaan taksi yang dapat dikelompokkan dalam taksi Jabodetabek, taksi bandara dan taksi Banten. Untuk memacu perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah di Wilayah Banten Selatan yang masih tertinggal dan terpencil telah dioperasikan angkutan perintis bus DAMRI sebanyak 8 mobil bus ukuran sedang untuk melayani trayek Cikeusik - Muara Binuangeun - Smp. Malingping - Bayah - Cikotok - Pasir Kurai - Cibareno dengan jarak perjalanan sepanjang 106 kilometer.

Jaringan kereta api di wilayah Provinsi Banten sepanjang 305,90 km adalah merupakan spur-tunggal (*single track*) yang terdiri dari lintas operasi sepanjang 141,6 km (lintas Merak - Tanahabang, Tangerang - Duri, Cilegon - Cigading) dan lintas tidak operasi sepanjang 164,3 km (lintas Rangkasbitung - Labuan, Saketi - Bayah dan Cigading - Anyerkidul). Pelayanan perkeretaapian masih dihadapkan pada kondisi jalur kereta api lebih panjang (melingkar) jika dibandingkan dengan jalan arteri primer (jalan nasional dan jalan tol) yang berdampak pada waktu tempuh perjalanan, serta sangat tergantung pada sistem jaringan kereta api di wilayah DKI Jakarta yang lalu lintasnya sudah tinggi (pelayanan kereta api terputus sampai di Tanahabang). Disamping itu, jaringan kereta api belum menyentuh langsung pada bangkitan perjalanan seperti kawasan industri Anyer, Ciwandan, Merak, Bojonegara, Ciruas, Cikande, Balaraja dan pelabuhan, bandar udara, serta jalur padat yang melayani angkutan komuter seperti pada lintas Tangerang-Jakarta dan lintas Serpong-Jakarta yang masih dilayani dengan spur tunggal (*single track*).

Banten memiliki peran penting terhadap sistem transportasi nasional maupun internasional, antara lain disebabkan oleh: (1) Keberadaan Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai gerbang utama wilayah nasional, dengan kemampuan layanan maksimum mampu melayani pesawat jenis B747, dan saat ini didalamnya beroperasi sekitar 60 maskapai penerbangan nasional dan internasional. (2) Keberadaan Pelabuhan Ciwandan sebagai salah satu pelabuhan curah terbesar di wilayah nasional, dengan alur dan kolam pelabuhan memiliki kedalaman -7 sampai dengan -15 Lws, serta dapat melayani kapal sampai dengan 72.000 Dwt. (3) Keberadaan pelabuhan merak sebagai jembatan terapung antara Jawa-Sumatera, dengan jumlah dermaga sebanyak 5 buah (4 dermaga kapal Ro-Ro dan 1 dermaga kapal cepat) serta dengan kapasitas dinamis pelayanan penyeberangan Merak-Bakauheni sebanyak 65.637 penumpang/hari dan 8.000 unit kendaraan/hari dengan jumlah frekwensi/hari 80 trip Kapal Ro-Ro dan 36 trip Kapal Cepat.

Walaupun berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa ketersediaan sarana angkutan umum baik angkutan dalam kota (AKDP) maupun angkutan antar kota (AKAP) di Provinsi Banten setiap tahunnya terus meningkat namun hal ini tidak diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dan pemerataan sebarannya. Peningkatan sarana angkutan umum ini umumnya lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkotaan saja, sehingga wilayah-wilayah *hinterland* (pinggiran kota) dan terpencil masih mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan layanan angkutan umum ini.

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan sistem jaringan transportasi (antar moda, antar wilayah dan antar lembaga) masih belum terpadu. Fenomena ini umumnya terjadi pada sarana transportasi di wilayah perkotaan yang diakibatkan belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum. Lebih jauh lagi kondisi ini mengakibatkan semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan serta tingginya angka kecelakaan dari tahun ke tahun.

Irigasi. Jaringan irigasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pengelolaan provinsi, hingga tahun 2006 telah terkelola sepanjang 866.915 m atau seluas 82.848 Ha. Dari jaringan irigasi yang telah terkelola tersebut, sekitar 22,87% atau sepanjang 198.288 m merupakan jaringan irigasi yang tidak dapat berfungsi atau tidak dapat beroperasi secara optimal karena berada dalam kondisi rusak berat. Sementara itu jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan, pada tahun yang sama mencapai 132.190 m (15,25%) dan sisanya dalam kondisi baik 536.437 m (61,88%).

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berfungsi atau beroperasinya jaringan irigasi dengan luasan yang cukup signifikan tersebut antara lain adalah belum lengkapnya sistem jaringan, ketidaktersediaan air, belum siapnya lahan sawah, ketidaksiapan petani penggarap, serta akibat terjadinya konversi atau alih fungsi lahan. Pada tahun 2006 dari sekitar 327.414 Ha luas lahan persawahan di Provinsi Banten, sekitar 12,18% atau 39.813 Ha merupakan lahan persawahan yang masih menggunakan sistem pengairan tadah hujan, sehingga tidak dapat berproduksi sepanjang tahun (panen 2-3 kali/tahun), melainkan hanya berproduksi pada musim penghujan saja (panen 1-2 kali/tahun). Hal ini dikarenakan pada musim kemarau persawahan tadah hujan tidak dapat berproduksi karena tidak memiliki pasokan air.

Ketenagalistrikan. Sistem kelistrikan di Banten merupakan bagian dari sistem interkoneksi tenaga listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) Di Banten, dengan pembangkit utama PLTU Suralaya dengan kapasitas 3.400 MW yang merupakan salah satu unit pembangkit milik PT Indonesia Power. Distribusi listrik dari Suralaya selanjutnya ditransmisi ke dua GI SUTET berkapasitas 500 kV yaitu GI Suralaya dan Cilegon Barat, 30 GI SUTT 150 kV, dan tiga GI SUTT 70 kV yang menyalurkan listrik ke pusat-pusat beban di Banten. Tiga GI terakhir di Rangkasbitung, Menes, dan Saketi sedianya dikhususkan untuk memasok listrik ke Banten selatan, namun ternyata belum terpenuhi. Padahal beban distribusi untuk tiga kecamatan di Banten selatan yang masuk Kabupaten Lebak, yaitu Bayah, Cibeber, dan Cilograng diserahkan distribusinya ke GI Palabuhan Ratu, Kab. Sukabumi.

Berdasarkan analisa karakteristik konsumen listrik, sektor industri di wilayah Banten ini merupakan pemakai tenaga listrik terbesar dengan mengonsumsi listrik 7.837,4 GWh atau 68,3% pemakaian total. Beban tertinggi dari kebutuhan listrik di Banten hanya 2,4 GW atau 17,9% dari beban tertinggi sistem Jamali yang dihasilkan tujuh pembangkit di lingkungan PLTU Suralaya dengan kapasitas 3,4 GW. Kebutuhan pasokan listrik kedepan terutama akan terserap pada rencana pengoperasian Pelabuhan Bojonegara. Sebab, pelabuhan peti kemas bertaraf internasional diasumsikan menyedot 13 MVA di mana faktor bebannya diperkirakan mencapai 60% pada 2020. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penyusutan pasokan listrik untuk kelompok rumah tangga, sementara 2020 diproyeksikan menjadi tahun pamungkas pemerataan sistem kelistrikan di seluruh pelosok Banten.

Keandalan sistem interkoneksi Jamali sejak akhir 2002 mulai menurun seiring semakin meningkatnya permintaan listrik namun tidak dibarengi dengan bertambahnya kapasitas pembangkit. Memasuki 2003, kondisi kelistrikan Jamali cukup kritis, *reserve margin* dalam kondisi normal tinggal 25%, dan akan terus menurun bila terjadi perbaikan. Jika pertumbuhan permintaan listrik di sistem Jamali sampai 2010 diasumsikan 6% per tahun, maka pada tahun ini diperlukan tambahan kapasitas 12 GW (giga watt). Penambahan kapasitas sebesar ini akan dipenuhi oleh PLN sebesar 5 GW, 7 GW sisanya diharapkan dipenuhi listrik swasta.

Perumahan dan Permukiman. Jumlah rumah tangga di Provinsi Banten hingga tahun 2005 sebesar 2.504.330 KK, dimana baru 80,82% (2.023.881 KK) diantaranya yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Dengan demikian, sekitar 480.449 KK lainnya hingga saat ini bertempat tinggal dengan cara kontrak, sewa, numpang atau cara lainnya. Tingkat hunian di kawasan perkotaan cenderung lebih rendah, sebagaimana di Kota Cilegon (66,58%) dan Kota Tangerang (69,88%) dimana kepadatan penduduk, keterbatasan lahan dan daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Disisi lain, hasil pengadaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun Pengembang Swasta jumlahnya dirasakan masih sangat terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat di perkotaan. Kebutuhan terhadap penyediaan perumahan di Provinsi Banten terus berpacu dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang secara rata-rata sebesar 3,85% atau 83.633 KK pada setiap tahunnya selama kurun waktu 2002-2005.

Sebanyak 64,65% rumah tangga di Provinsi Banten menghuni tempat tinggal dengan luas lantai > 50 m², dimana bila dikaitkan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga pada tahun 2005 yang sebesar 4 orang dan ukuran idealnya rata-rata luas lantai per kapita minimal 10 m² (sehingga 1 keluarga idealnya

menempati rumah dengan luas lantai sekurang-kurangnya 40 m²), maka sebagian besar rumah tangga telah menempati rumah dengan luas lantai yang layak. Sedangkan kualitas perumahan berdasarkan rumah tinggal berlantai tanah di Provinsi Banten masih tercatat sebanyak 10,20%. Rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air bersih sebesar 67,00% (atau masih terdapat 33,00% yang belum menggunakan air bersih). Sedangkan, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri sebagai sarana buang air besar baru terdapat 69,80% (atau terdapat rumah tangga yang tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar 30,20%).

Sekitar 726.000 rumah tangga (KK) di Provinsi Banten hingga tahun 2005 belum mendapatkan layanan listrik, dimana dari jumlah itu, 56,00% KK berada di Kabupaten Pandeglang, 40,00% di Kabupaten Lebak, dan sisanya tersebar di empat wilayah lain. Dengan demikian rasio elektrifikasi rumah tangga di Provinsi Banten baru mencapai 71,02%. Sementara itu, rasio elektrifikasi desa dari 71,17% pada tahun 2002 telah mampu ditingkatkan menjadi 82,81% hingga tahun 2005, dengan demikian sekitar 255 desa yang belum mendapatkan layanan listrik.

Permasalahan kualitas perumahan lainnya di Provinsi Banten antara lain terdapat 284,43 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten, yang tersebar di Kabupaten Serang (96,88 ha), Kabupaten Pandeglang (29,77 ha), Kabupaten Lebak (95,15 ha), Kabupaten Tangerang (16,05 ha), Kota Tangerang (20,48 ha), serta Kota Cilegon (26,11 ha).

2.5.2. Tantangan

Berdasarkan kondisi dan potensi pembangunan pada aspek prasarana dan sarana yang terdapat di Provinsi Banten serta dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana di masa mendatang, maka diidentifikasi beberapa tantangan kedepan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

- a. Mendorong percepatan pembangunan dan operasionalisasi Pelabuhan Internasional Bojonegara yang ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.
- b. Mengembangkan sistem transportasi yang efektif, efisien, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan wilayah.
- c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan.
- d. Memperluas cakupan pelayanan energi, listrik dan telekomunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
- e. Memperluas cakupan pelayanan jaringan air bersih dan persampahan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
- f. Meningkatkan daya dukung dan kualitas pelayanan fasilitas dasar lingkungan permukiman sehingga mampu mengurangi kawasan permukiman kumuh.
- g. Meningkatkan produktivitas kawasan strategis sehingga mampu mengurangi kesenjangan dan mempercepat pengembangan wilayah.

2.6. KONDISI DAN TANTANGAN ASPEK TATA RUANG, SUMBERDAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.6.1. Kondisi Umum

Penataan Ruang. Ladang/tegalan mendominasi penggunaan lahan di wilayah daratan Provinsi Banten dengan luas berkisar 36,28% dari luas wilayah. Penggunaan lahan untuk perkebunan mencapai 18,37% yang sebagian besar tersebar di bagian selatan dan sebagian bagian barat Provinsi Banten. Areal persawahan dengan luas pemanfaatan mencapai 19,94% terutama terdapat di bagian utara dan sebagian di bagian barat. Pemanfaatan lainnya yang berupa kawasan hutan mencapai 24,05%, yang terdiri dari kawasan konservasi seluas 126.397,3 ha, hutan lindung seluas 9.372,79 ha dan hutan produksi seluas 72.292,58 ha. Kawasan konservasi terdiri dari 2 (dua) Taman Nasional (Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak), Cagar Alam dan Taman Wisata Alam, dimana selain daratannya juga terdapat kawasan konservasi perairan seluas 45.057 ha. Selain kawasan-kawasan hutan tersebut, Provinsi Banten juga memiliki kawasan konservasi khusus masyarakat Baduy seluas 5.136,58 ha. Sementara itu, kawasan permukiman sebagian besar tersebar di wilayah utara Provinsi Banten dengan luas pemanfaatan mencapai 8,39%. Terdapat 32 kawasan industri di Provinsi Banten dengan luas keseluruhan mencapai 15.384,20 ha atau 1,78% terhadap luas wilayah.

Berdasarkan Profil Penataan Ruang Provinsi Banten (Departemen Kimpraswil, 2003), hingga tahun 2003 sekitar 5.566 ha lahan sawah dan 3.841 ha lahan tegalan telah terkonversi menjadi lahan perumahan, industri, perkantoran, dan lain-lain. Disamping itu, sekitar 1.228 ha lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan telah beralih fungsi menjadi sawah, perumahan, industri dan perkantoran dan lain-lain.

Pemanfaatan ruang di wilayah perairan (laut) Provinsi Banten digunakan sebagai kawasan konservasi, kawasan penangkapan ikan, kawasan budidaya laut, serta kawasan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Kawasan konservasi di Provinsi Banten diantaranya meliputi 44.337 ha yang merupakan wilayah kerja Taman Nasional Ujung Kulon, antara lain dimanfaatkan untuk perlindungan mangrove, padang lamun, karang hidup dan karang mati. Pemanfaatan kawasan penangkapan ikan seperti penangkapan ikan tradisional (0-4 mil), komersial (4-6 mil), semi industri dan industri (6-12 mil, perairan nusantara dan ZEE), kawasan budidaya laut seperti budidaya rumput laut. Kawasan kepelabuhanan terutama tersebar di wilayah pantai dan laut Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, seiring dengan keberadaan dan fungsi 2 pelabuhan umum dan 35 pelabuhan khusus.

Sumberdaya Alam. Provinsi Banten dengan luas daratan 8.651,20 km² menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, antara lain keberadaan hutan produksi seluas 72.292,58 ha. Disamping itu, sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian yang telah dikembangkan terdiri dari 84.315,40 ha lahan persawahan teririgasi, 90.423,50 ha sawah tadah hujan, serta 158.884,13 ha area perkebunan, dan belum termasuk lahan-lahan pertanian yang diusahakan untuk budidaya palawija, hortikultura, sayuran dan buah-buahan.

Dari sisi pertambangan dan energi, sumberdaya mineral sebagian besar telah diusahakan baik oleh swasta maupun masyarakat, seperti zeolit, bentonit, sirtu, pasir kuarsa, batu gamping, felspar, bondclay, lempung,

fosfat, toseki, kalsedon, opal, kayu terkersikan, marmer, pasir laut, emas, batubara. Beberapa potensi sumberdaya mineral lainnya di Provinsi Banten hingga saat ini belum diusahakan seperti tras, batu apung, besi dan andesit. Disamping itu, belum dimanfaatkannya sumberdaya energi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan seperti: sumberdaya energi fosil (batubara), energi panas bumi, tenaga air skala kecil, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan energi gelombang laut.

Sementara itu, wilayah pesisir dan laut Provinsi Banten dengan luas perairan 11.134,22 km² (belum termasuk perairan nusantara/teritorial dan ZEEI yang dapat dimanfaatkan), dengan panjang garis pantai 501 km, serta 55 pulau-pulau kecil menyimpan kekayaan dan keragaman sumberdaya pesisir dan laut. Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut dengan produksi tahun 2004 yang sebesar 76.324,50 Ton baru memanfaatkan 82,09% dari potensi lestari di wilayah perairan Kab. Pandeglang (92.971 Ton) sehingga belum memperhitungkan potensi lestari wilayah perairan lainnya. Potensi sumber daya perikanan budidaya, seperti budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, serta lahan tambak hingga tahun 2004 baru dimanfaatkan sekitar 78,8 % (10.850,03 Ha) dari potensi 13.768,9 Ha.

Sementara itu, bentang alam yang terdiri dari wilayah pegunungan hingga wilayah laut mengandung potensi jasa lingkungan yang hingga saat ini telah diidentifikasi sebagai obyek wisata kategori alam sebanyak 60 obyek, dimana sebagian telah berkembang menjadi obyek wisata nasional maupun internasional, seperti Kawasan Pantai Anyer-Carita-Tanjung Lesung, Living Culture Baduy, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Gunung Api Krakatau. Namun, obyek wisata yang berkembang secara umum masih terkonsentrasi pada wilayah utara dan barat, sedangkan di wilayah selatan relatif belum berkembang terutama disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur pendukung (transportasi dan akomodasi wisata).

Sumberdaya Air. Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan pembagian Wilayah Sungai (WS), Provinsi Banten dibagi menjadi tiga WS, yaitu: WS Ciujung-Ciliman, WS Cisadane-Ciliwung, dan WS Cisadea-Cikuningan. Hingga tahun 2005, dari sepanjang 404.000 m sungai lintas kabupaten/kota yang ditangani oleh provinsi, sepanjang 78.958 m atau sekitar 19,54% berada dalam kondisi rusak berat dan 52.639 m atau 13,03% berada dalam kondisi rusak ringan. Kerusakan sungai tersebut umumnya terjadi pada 3 Wilayah Sungai utama yang terdapat di Provinsi Banten, yaitu WS Ciujung-Ciliman, WS Cisadea-Cikuningan dan WS Cisadane-Ciliwung. Meluas dan bertambahnya jumlah sungai kritis ini telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan cekungan air bawah tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawa Dano dan CABT Malimping dan lintas provinsi, meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta. Berdasarkan keterdapatan dan produktivitas akuifernya, kualitas air bawah tanah tergolong baik sebab air ini layak minum tetapi jika dilihat dari kuantitasnya yang tergolong rendah sampai sedang bahkan ada yang mencapai nihil berdasarkan potensi satuan cekungan air bawah tanah. Untuk itu karena produktivitasnya yang tidak tinggi, pemanfaatan air tanah ini hanya layak untuk keperluan rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan untuk daerah yang dapat dikembangkan air tanahnya seperti daerah sempit

sepanjang pantai, pengembangan air tanah dapat dilakukan dengan pembuatan sumur gali atau sumur pasak yang hanya membutuhkan teknologi yang sederhana.

Potensi sumber air situ dan waduk yang ada cukup besar dimana dari total volume tampungan yang tercatat $\pm 8.090.182 \text{ m}^3$ sebagian besar dimanfaatkan untuk irigasi persawahan, kebutuhan air baku bagi penduduk, dan hanya sebagian kecil yang airnya digunakan untuk kebutuhan industri dan objek wisata. Pemanfaatan sumber air untuk industri hanya meliputi Situ Rawa Danau, dimana sebagian besar untuk suplai air ke kawasan industri di Cilegon terutama Kawasan Industri Krakatau Steel. Hampir sebagian besar situ tidak dilengkapi dengan bangunan-bangunan irigasi seperti bangunan intake, pintu pengambilan, bangunan penguras, bendung/tanggul dan pelimpah (*spillway*). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pengendapan sedimentasi yang tinggi terutama pada sisi tanggul dan pada musim hujan air situ cukup melimpah, tetapi pada musim kemarau mengalami kekurangan air khususnya bagi para petani yang memanfaatkan saluran irigasi dari situ tersebut.

Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak dan praktek produksi yang tidak ramah lingkungan.

Berbagai aktifitas ekonomi belum mengindahkan kelestarian lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung, serta maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti: Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung Kota Cilegon.

Produksi sampah perkotaan di Provinsi Banten sekitar $16.539 \text{ m}^3/\text{hari}$ atau sekitar $5.971.035 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Daerah penghasil sampah terbesar adalah Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar $5.995 \text{ m}^3/\text{hari}$, sedangkan produksi sampah di kota lainnya dibawah $4.000 \text{ m}^3/\text{hari}$. Pengelolaan persampahan maupun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah belum cukup baik, hal ini ditandai dengan banyak dijumpainya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, seperti dibadan sungai dan di pinggir jalan.

Pengelolaan limbah B3 masih belum optimal, dimana hingga saat ini ditenggarai masih adanya sejumlah perusahaan yang memperjualbelikan limbah B3. Disamping itu, permasalahan terkait dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kekhawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak di wilayah perbatasan.

Bencana. Ancaman bencana banjir terutama pada daerah pesisir barat Banten yang dikarekan endapan batuan yang terdapat didalamnya (batugamping) merupakan batuan yang peka terhadap erosi karena sifat batumannya yang tidak dapat menyerap air. Disamping itu, daerah selatan Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Malingping juga sering terjadi banjir dan erosi pada waktu musin hujan.

Dampak gempa vulkanik dan tektonik hingga tsunami merupakan potensi bencana di wilayah Provinsi Banten antara lain disebabkan keberadaan Gunung Krakatau di Selat Sunda yang masih aktif serta kedudukan Provinsi Banten terhadap 'daerah lemah' khususnya bagian selatan Jawa. Menurut peta sejarah kegempaan yang dimiliki Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa bumi berskala besar dan kecil banyak melanda wilayah barat dan selatan Indonesia, mencakup wilayah sepanjang bagian barat Sumatera, bagian selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi bagian tenggara, tengah dan utara, dan Papua. Dalam istilah geologi wilayah-wilayah ini dikenal dengan sebutan "daerah lemah".

Gempa bumi yang terjadi di daerah lemah ini sebagian besar berpusat di perairan yang relatif dekat dengan pulau-pulau tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur. Diketahui bahwa di Samudera Hindia sebelah selatan Pulau Jawa terdapat Palung Jawa yang sangat curam, dengan ketinggian lerengnya sekitar 2.500 kilometer. Jika terjadi gempa di suatu tempat hingga mengganggu kestabilan lereng tersebut dan menyebabkan lereng sampai roboh, maka hal itu akan menimbulkan gempa dan gelombang tsunami yang sangat besar serta mengakibatkan pergeseran hingga ribuan kilometer.

2.6.2. Tantangan

Berdasarkan kondisi dan potensi pembangunan pada aspek Tata Ruang, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup yang terdapat di Provinsi Banten serta dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Tata Ruang, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup di masa mendatang, maka diidentifikasi beberapa tantangan kedepan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

- a. Menjaga dan meningkatkan konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Meningkatkan pengelolaan kawasan strategis.
- c. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan merata.
- e. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui pola pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- f. Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.
- g. Meminimalisir ancaman krisis lingkungan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan.
- h. Menjaga dan merevitalisasi fungsi konservasi kawasan lindung.
- i. Mengembangkan sistem mitigasi bencana terutama pada wilayah-wilayah rawan bencana.
- j. Mengembangkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengedepankan peran aktif masyarakat.